

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam Undang-Undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum, sedangkan bagi masyarakat, pajak merupakan perwujudan pengabdian untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Menurut Suandi (2005) pajak dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu berdasarkan golongan, wewenang pemungutannya, dan sifatnya. Adapun pajak berdasarkan wewenang pemungutannya terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak, misalnya; pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, seperti; pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan

pajak reklame. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak melakukan perluasan subjek dan objek pajak. Salah satu subjek pajak adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang perkembangan usahanya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akan tetapi sampai saat ini UMKM tersebut belum menjadi subjek pajak secara keseluruhan karena masih banyak UMKM yang informal. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diberlakukan, namun masih banyak ditemukan Usaha Kecil Menengah yang lepas dari jeratan pajak.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun negara. Seperti halnya di Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi di sektor industri, dengan perkembangan Usaha skala Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Potensi Unit Usaha Industri Kulit (2012) Kabupaten Garut

Komoditi	Jumlah Unit Usaha		
	Formal	Informal	Jumlah
Kerajinan Barang Kulit, dsb	69	250	319
Pakaian jadi dari kulit	75	342	417

Sumber: Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Garut, 2012

Berdasarkan tabel diatas kerajinan barang kulit dengan jumlah usaha 319 unit, 78,4% didominasi oleh usaha informal dan 21,6% oleh usaha formal. Demikian halnya dengan pakaian jadi dari kulit dengan jumlah usaha 417 unit, 82% didominasi oleh usaha informal dan 18% oleh usaha formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya usaha-usaha yang tidak berbadan hukum, sehingga tidak termasuk bagian dari subjek pajak.

Berdasarkan fakta diatas, jika usaha tersebut menjadi sektor formal maka potensi perolehan pajak negara akan meningkat. Dengan demikian hal tersebut menarik untuk diteliti, berapa potensi pajak jika usaha informal menjadi formal, dan apa yang menjadi pendorong mereka untuk berubah menjadi usaha formal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Potensi Pajak Penghasilan Badan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Industri Kulit di Kabupaten Garut”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Berapa besar proyeksi potensi penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) pada UMKM kulit di Kabupaten Garut?
- b. Apa faktor-faktor yang paling berpengaruh untuk mendorong UMKM menjadi usaha sektor formal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menghitung proyeksi potensi penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) pada UMKM kulit di Kabupaten Garut.

- b. Menganalisis faktor-faktor yang paling berpengaruh untuk mendorong UMKM menjadi usaha sektor formal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk:

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai proyeksi potensi penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) badan UMKM industri kulit di Kabupaten Garut.
- b. Bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam usaha pengembangan lebih lanjut pada kajian penelitian yang sama yang mungkin dapat mengembangkan variabel-variabel lain.

1.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Soemitro dalam Rahayu (2011), pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum. Feldman (1949) menyebutkan bahwa pajak merupakan prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norm-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Begitu juga menurut Adriani (2010), pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan perpajakan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan. Sementara dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 2007 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa

pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam sistem perpajakan Indonesia jenis pajak menurut wewenang negara terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat / pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, departemen keuangan dan pelaksanaannya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan kantor pelayanan PBB, contohnya; PPN & PPnBM, PPh. Kedua, Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah propinsi dan atau kabupaten dan kota, contohnya; pajak kendaraan, pajak penerangan jalan. Adapun subjek pajak atau wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun objek pajak meliputi gaji, tunjangan, hadiah, laba, pengalihan harta, bunga sewa, dan lain sebagainya.

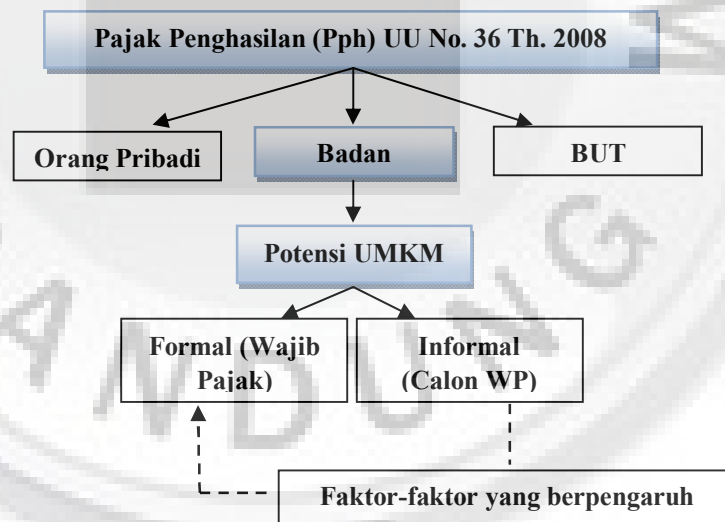
Badan merupakan salah satu subjek pajak yang menambah penerimaan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak meliputi; orang pribadi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu badan/usaha yang ditempatkan sebagai salah satu *leverage* (pengungkit) atau

trigger (pemicu) untuk pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran. Hal itu tercermin dalam Inpres No.6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Disisi lain UMKM juga merupakan target subjek pajak bagi penerimaan negara, namun faktanya terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil, rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku UMKM terkait dengan beberapa hal, yaitu pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga, pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa-usaha yang memiliki karakteristik cenderung kurang patuh, dan sebagian pelaku UMKM bergerak di sektor informal dimana catatan transaksi UMKM cenderung tidak ada (Direktorat Jendral Pajak, 2013).

Masih adanya usaha informal di Indonesia mencerminkan belum maksimalnya kinerja pajak di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah kembali melakukan reformasi pajak dengan menerbitkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU PPh No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Pph). Dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010 bagi Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto di atas Rp.50.000.000.000,00 untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang. Selain itu, bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto hingga Rp.50.000.000.000,00 diberikan fasilitas pengurangan 50% dari yang berlaku untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang. Penurunan pajak sudah dilakukan untuk meringankan jumlah PPh Badan terutang wajib pajak badan, namun cara perhitungan ini tergolong sulit bagi UMKM dengan kemampuan pencatatan/akuntansi yang minim.

Pada tahun 2013 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu, Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa wajib pajak pribadi dan badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final, yaitu sebesar 1%. Berdasarkan regulasi yang baru diharapkan potensi penerimaan pajak semakin meningkat, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mendorong wajib pajak yang baru. Dimana ketika UMKM informal berubah menjadi formal maka potensi pajak penghasilan badan akan meningkat, dan akan menambah penerimaan negara. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disarikan pada Gambar 1.1.



Sumber : Analisis Penulis, 2016

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Potensi Pajak Penghasilan Badan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Industri Kulit di Kabupaten Garut

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Menurut Kuncoro (2003) untuk memperoleh data primer, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data origin. Pengumpulan data origin adalah melalui *interview* (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan dengan penelitian arsip (*achival research*) dan studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kuesioner

Penelitian ini data diperoleh dengan cara mendatangi seluruh responden dan memberikan angket atau kuesioner untuk diisi responden, kemudian responden mengisi jawaban pertanyaan dalam angket, serta mengumpulkan kembali angket yang telah diisi.

b. Dokumentasi

Data-data sekunder seperti jumlah pengusaha dan data-data sekunder lainnya maka dilakukan penelitian terhadap dokumen atau arsip yang diperlukan.

1.6.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, obyek, transaksi atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Elemen sendiri merupakan unit dimana data yang dikumpulkan atau dapat dianalogikan sebagai unit analisis (Kuncoro, 2003).

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah UMKM industri kulit yang ada di Kabupaten Garut. Tercatat jumlah UMKM industri kulit di Kabupaten Garut sampai Tahun 2014 berjumlah 759 unit yang terdiri dari 148 unit usaha

formal dan 611 unit usaha informal. Sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi (Kuncoro, 2003). Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini, dengan mempertimbangkan jumlah populasi UMKM industri kulit Kabupaten Garut sebesar 759 unit, maka digunakan sebuah rumus untuk menentukan besaran sampel yaitu rumus slovin dalam Umar (2003):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

E = Toleransi kesalahan dalam menentukan sampel maksimal 10%

Mengacu pada penjelasan tersebut, maka jumlah sample dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{759}{1 + 759(0,10)^2}$$

$$n = \frac{759}{(1+759(0,10) \times (0,10))}$$

$$n = \frac{759}{8,59}$$

$$n = 80,3$$

Dari rumus diatas sample yang didapat adalah 80 sampel. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan metode *cluster sampling*

(area sampling). Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan dengan menentukan sampel pada tiap UMKM industri kulit.

1.6.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Menurut Kerlinger (1973) variable adalah konstruksi atau sifat yang akan dipelajarinya. Selain itu ia menyatakan bahwa variable dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (*different value*). Dengan demikian variable merupakan sesuatu yang bervariasi.

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati dan diukur. Definisi operasional dari variabel yang akan diteliti dalam penulisan ini akan diuraikan pada Tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2 Variabel Operasional

Penemu	Variabel	Definisi variabel	Indikator Variabel
Djamhari (2006)	Fasilitas	Ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana.	- Jalan - Listrik - Pasar (Toko)
Sudiarta (2014)	Modal Usaha	Ketersediaan financial (sarana dan prasarana modal) yang mendukung usaha berjalan	- Modal pribadi - Bantuan Pemerintah - Akses permodalan - Lembaga Keuangan
Munizu (2010)	Birokrasi Pemerintah	Kemudahan usaha untuk mendapatkan perizinan dan pelayanan	- Pelayanan - Sosialisasi - Kebijakan pemerintah
Soemitro (2010)	Pajak	Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang	- Pengetahuan pajak - Pelayanan pajak

1.6.4 Metode Analisis

a. Skala Pengukuran Variabel

Penulisan ini menggunakan skala likert sebagai indikator variabel yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengukur perilaku sikap, pendapat, dan persepsi pengusaha tentang pemilihan lokasi.

Dengan menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi beberapa indikator variabel. Kemudian indikator variabel tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner. Setiap jawaban pada item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2012). Pada penelitian kali ini peneliti akan menggunakan gradasi jawaban sebagai berikut :

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak setuju
- e. Sangat tidak setuju

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban yang dihasilkan tersebut kemudian diberi skor dan selanjutnya dijumlahkan untuk mendapat gambaran mengenai perilaku responden. Skor yang diberikan untuk setiap jawaban atas pertanyaan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2012).

- | | |
|------------------|--------|
| 1. Sangat setuju | skor 5 |
| 2. Setuju | skor 4 |
| 3. Ragu-ragu | skor 3 |

4. Tidak setuju skor 2
5. Sangat tidak setuju skor 1

b. Metode Analisis *Binary Logistic Regression*

Regresi logistik dilakukan ketika peneliti ingin menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2007). Teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas data dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel independen yang digunakan dalam model, artinya variabel penjelasannya tidak harus memiliki distribusi normal, linier, maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grup. Gujarati (2009) menyatakan bahwa regresi logistik mengabaikan *heteroscedacity* artinya variabel dependen tidak memerlukan *homoscedacity* untuk masing-masing variabel independen.

Regresi logistik digunakan karena memiliki beberapa aspek kelebihan, Hair (1995) menyatakan bahwa yang pertama regresi logistik mengandalkan ketelitian pertemuan asumsi normalitas multivariate dan kesamaan varian kovarian matrik semua kelompok, dimana situasi ini sulit ditemukan. Kedua, bahkan jika asumsi ini ditemukan, banyak peneliti lebih menyukai logit analisis karena logit analisis sama dengan regresi dengan uji *statistic straight forward* dan metode regresi logistik memiliki kemampuan untuk menggabungkan pengaruh nonlinier. Ketiga, regresi logistik sama dengan diskriminan analisis namun lebih tepat digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti data tidak normal, terdapat multikolinieritas antar variabel independen dan pelanggaran asumsi klasik lainnya.

Kuncoro (2003) juga mengatakan bahwa regresi logistik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan teknik analisis lain yaitu:

- a. Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas dan heteroskedastisitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model sehingga tidak diperlukan uji asumsi klasik walaupun variabel independen berjumlah lebih dari satu.
- b. Variabel independen dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel kontinu, distrik, dan dikotomis.
- c. Regresi logistik tidak membutuhkan keterbatasan dari variabel independennya.
- d. Regresi logistik tidak mengharuskan variabel bebasnya dalam bentuk interval.

Model umum regresi logistik menurut (Gujarati, 2009):

$$L = \ln \frac{p}{1-p} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \dots + b_k X_k$$

Keterangan :

p = probabilitas

b_0 = konstanta regresi

$b_1, b_2, b_3, \dots, b_n$ = koefisien regresi

$X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ = variabel independen

Analisis pengujian model regresi logistik (Ghozali, 2006 ; Kuncoro, 2001; Gujarati, 2003):

- a. Menilai model regresi

Logistic regression adalah model regresi yang sudah mengalami modifikasi sehingga karakteristiknya sudah tidak sama lagi dengan model regresi sederhana atau berganda. Oleh karena itu penentuan signifikansinya secara statistik berbeda. Dalam menilai model regresi logistik (termasuk probit dan

tobit) dapat dilihat dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's goodness of fit*. Pengujian ini dilakukan untuk menilai model yang dihipotesiskan agar data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's goodness of fit test* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak. Sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak artinya model mampu memprediksi nilai observasinya atau cocok dengan data.

H_0 = model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_a = model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

b. Menilai keseluruhan model (*overall model fit*)

Menilai keseluruhan model ditunjukkan dengan *log likelihood value* (nilai $-2 \log L$) yaitu dengan cara membandingkan antara nilai $-2 \log L$ pada awal (block number = 0) dimana model hanya memasukkan konstanta dengan $-2 \log L$ setelah mode memasukkan variabel bebas (*block number* = 1). Apabila nilai $-2 \log L$ block number = 0 > nilai $-2 \log L$ block number = 1 maka menunjukkan model regresi yang baik. *Log likelihood* pada regresi logistik mirip dengan pengertian "*sum of square error*" pada model regresi sehingga penurunan *log likelihood* menunjukkan model regresi semakin baik.

c. Menguji koefisien regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Hasil pengujian didapat dari program *evIEWS* berupa tampilan *table variables in the equation*. Dari tabel tersebut didapat nilai koefisien nilai *wald statistic* dan signifikansi, untuk menentukan penerimaan atau penolakan

Ho dapat ditentukan dengan menggunakan *wald statistic* dan nilai probabilitas (sig) dengan cara nilai *wald statistic* dibandingkan dengan *chi square* tabel sedangkan nilai probabilitas (sig) dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) 5% dengan kriteria:

- a) Ho tidak dapat ditolak apabila *wald statistic* < *chi square* tabel dan nilai probabilitas (sig) > tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti H_a ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak.
- b) Ho dapat ditolak apabila *wald statistic* > *chi square* tabel dan nilai probabilitas (sig) < tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti H_a diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima.
- d. Koefisien regresi dapat dilihat dari nilai B pada tampilan tabel *variables in the equation*. Tanda yang didapat dari nilai B tersebut menyatakan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Regresi logistik bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Variabel dependen pada regresi logistik berjenis kategorikal (0 dan 1) dan regresi logistik yang membagi variabel terikatnya pada dua buah kategori disebut sebagai regresi binary logistik (*binary logistic regression*). Variabel bebas pada model regresi logistik dapat berupa kombinasi variabel kontinyu (metrik) maupun variabel kategorik (non-metrik). Model regresi logistik menggunakan transformasi logit. Persamaan *logistic regression* untuk k variabel bebas dapat dinyatakan sebagai berikut (Ghozali, 2007):

$$L = \ln \frac{P}{1-p} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \dots + b_k X_k$$

P adalah probabilitas variabel terikat dengan variabel bebas X_1, X_2, \dots, X_n . Probabilitas kadang-kadang dinyatakan dalam istilah odds. Model log dari odds merupakan fungsi linear dari variabel bebas dan ekuivalen dengan persamaan *multiple regression* dengan log dari odds sebagai variabel terikat. Oleh karena log dari odds sering disebut logit maka persamaan regresinya disebut *multiple logistic regression* atau *logistic regression*.

Model fungsi persamaan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$L = Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_4, X_5)$$

Dimana :

Y = 1 = Formal, 0 = Informal

X1 = Fasilitas

1 = Fasilitas yang baik dan memadai

0 = Fasilitas yang kurang baik

X2 = Modal Usaha = Rp.

X3 = Birokrasi Pemerintah

1 = Birokrasi pemerintah baik/memuaskan

0 = Birokrasi pemerintah kurang baik

X4 = Lama Usaha = tahun

X5 = Tenaga Kerja = orang

Terdapat beberapa kelebihan dari metode analisis regresi logistic dibandingkan dengan metode statistika lainnya, yaitu (Ghozali, 2007):

1. Analisis regresi logistik umumnya dipakai jika asumsi normalitas data tidak terpenuhi.
2. Variabel bebas dalam regresi logistik dapat berupa data campuran antara variabel metrik dan non metrik.
3. Regresi logistik tidak mensyaratkan jumlah sampel untuk kategori variabel terikat dalam jumlah yang sebanding.



